

PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH RUMAH SAKIT UMUM dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH

oleh:

Ainul Ridha

Staff Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh

Abstract: *Abstract: This study aims to determine whether participation in budgeting at the Aceh Device Work Unit in General Hospital dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) has functioned well and in accordance with applicable procedures and regulations. The population in this research is all Aceh work unit at RSUDZA. Based on the established criteria, the targeted population is selected as many as 37 people. The method of analysis used in this research is descriptive quantitative analysis, which is analyzing the descriptive hypothesis. The results of this study indicate that Participation in the drafting of the budget that run by the General Hospital dr. Zainoel Abidin in Banda Aceh has not been running optimally so that future development budget arrangements can not keep up with the challenges and development.*

Keywords: *budget preparation, budgeting participation, aceh budget*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPA RSUDZA. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka terpilihlah jumlah populasi sasaran sebanyak 37 orang. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis hipotesis diskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi dalam penyusunan anggaran yang di jalankan oleh Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh belum berjalan secara optimal sehingga penyusunan anggaran pembangunan ke depan tidak dapat mengikuti tantangan dan perkembangan yang terjadi.

Kata kunci: *penyusunan anggaran, partisipasi penyusunan anggaran, anggaran aceh*

PENDAHULUAN

Pemerintah Aceh dalam pengelolaan otonomi aceh harus mampu menyusun anggaran untuk kepentingan masyarakat, memanfaatkan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien serta adil guna mencapai kinerja akuntabilitas publik yang baik. Secara umum kinerja pemerintah daerah merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi pemerintah daerah tersebut dalam periode tertentu (Bastian, 2006:343).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerrintah (PP) No.58/2005 dimana ditegaskan bahwa partisipasi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan sejenis dalam penyusunan anggaran di pemerintah aceh/sektor publik sangat penting yaitu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah menerbitkan diantaranya Peraturan Menteri Nomor 37 tahun

2014 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah bahwa Pemerintah Daerah sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, dituntut menyusun anggaran baik secara terbuka maupun akuntabilitas dengan melibat semua unsur yang terkait sehingga dapat menghasilkan anggaran yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu (Bastian, 2006:343). Menurut Rudianto (2009:10), partisipasi anggaran oleh manajemen sangat besar pengaruhnya, tanpa partisipasi aktif akan besar godaan untuk mencapai tujuan anggaran atau berpengaruh terhadap kinerja. Hal tersebut diperkuat oleh Abdullah (2012), bahwa partisipasi penyusunan anggaran dalam konteks pemerintahan daerah (organisasi sektor publik) adalah keterlibatan SKPD dalam penyusunan anggaran daerah (APBD).

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran dalam suatu organisasi sektor publik mempunyai peranan yang sangat penting untuk menghasilkan kinerja yang optimal bagi suatu organisasi sektor publik terutama memberikan pelayanan yang optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan publik. Penganggaran sektor publik akan berfungsi secara maksimal apabila partisipasi semua unsur dalam proses penyusunan anggaran terlibat secara sempurna dan memberikan kontribusi aktif dalam penyusunan anggaran tersebut.

Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) di Banda Aceh adalah SKPA dibawah Pemerintah Aceh. RSUDZA saat ini tidak hanya menjadi rujukan utama berbagai rumah sakit yang ada di Aceh tapi juga menjadi sebuah tempat studi banding bagi berbagai dokter dan staf medis lainnya dari berbagai provinsi di Indonesia. Kini RSUDZA memiliki beberapa pelayanan unggulan, yang bahkan dokter dan fasilitasnya tidak dimiliki oleh rumah sakit mana pun di republik ini.

Teknis dalam penyusunan anggaran setiap tahun telah melibatkan setiap unsur terkait untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran baik dari unsur program maupun bidang teknis terkait lainnya. Dengan demikian RSUDZA telah menerapkan partisipasi dalam penyusunan anggaran. Namun, menurut pengamatan penulis, masih terdapat permasalahan atau fenomena dalam penyusunan anggaran di RSUDZA yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran belum optimal. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh RSUDZA sering terlambat, sering direvisi atau tidak valid. Hal ini diprediksi disebabkan kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, motivasi peserta penyusunan anggaran yang masih rendah, dan sebagainya sehingga penyusunan anggaran terlambat. Akibat terlambatnya pengesahan anggaran maka realisasi anggaran tidak maksimal atau dibawah target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari semua realisasi anggaran RSUDZA. Faktor ini menunjukkan partisipasi dalam penyusunan anggaran masih rendah

atau belum optimal. Disamping itu, hasil wawancara dengan salah seorang pejabat dilingkungan RSUDZA mengatakan bahwa memang benar partisipasi RSUDZA dalam penyusunan anggaran belum optimal, antara lain masih ada kekurangan anggaran terutama di kegiatan yang terkait dengan medis, pengadaan fasilitas walaupun telah dilakukan peningkatan dan sebagainya.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pengertian Anggaran

Gita Pramudia Saraswati (2015:38) mengartikan anggaran yaitu rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.

Pengertian Partisipasi Penyusunan Anggaran

Partisipasi penyusunan anggaran adalah keterlibatan pihak-pihak secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan penyusunan anggaran. Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya.

Manfaat Partisipasi Penyusunan Anggaran

Manfaat dari partisipasi dalam penyusunan anggaran menurut Arfan Ikhsan dan Muhammad Ishak (2005:175) adalah:

1. Partisipasi menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka.
2. Partisipasi juga berarti meningkatkan rasa kesatuan kelompok.
3. Partisipasi berarti juga berkaitan dengan penurunan tekanan dan kegelisahan yang berkaitan dengan anggaran.
4. Partisipasi juga dapat menurunkan ketidakadilan yang dipandang ada dalam alokasi sumber daya organisasi antara subunit organisasi, serta reaksi negatif yang dihasilkan dari persepsi semacam itu.
5. Melalui proses negosiasi dan banyak diskusi anggaran yang terjadi dalam rapat, manajer akan menyadari masalah dari rekan-rekannya di unit organisasi lainnya dan memiliki pemahaman yang lebih baik atas saling ketergantungan antar-departemen.

Tahap Penyusunan Anggaran

Menurut Mardiasmo (2002) dalam Ramadhani dan Nasution (2009:132), partisipasi anggaran pada sektor Pemerintahan terdapat empat tahap atau siklus anggaran yaitu:

1. Tahap persiapan anggaran
Pada tahapan ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang telah tersedia.
2. Tahap ratifikasi
Tahap ratifikasi ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat.
3. Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran

tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh manajer keuangan pemerintah.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran
5. Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas.

Selanjutnya, Bastian (2006:190) menetapkan tahapan-tahapan penyusunan anggaran yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, biro keuangan dan biro penyusunan program, untuk mengetahui perkiraan penerimaan/pendapatan daerah untuk tahun yang akan datang.
2. Mengadakan pertemuan dengan Dinas Provinsi, dan kantor-kantor badan lainnya, yang terkait dengan penyusunan anggaran, untuk memberikan penyusunan anggaran pembangunan.
3. Meneliti dan memproses Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA) bersama biro penyusunan program serta biro Sekrertaris Wilayah Daerah (SEKWILDA) keuangan serta instansi yang bersangkutan.
4. Mengadakan pertemuan antar bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bersama ketua provinsi untuk penyaringan DUPDA yang didasarkan tersedianya anggaran pembangunan di tahun mendatang dan skala prioritas yang telah di tentukan oleh Kepala Daerah.
5. Disusun Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh (RAPBA) oleh tim anggaran yang nantinya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk dibahas
6. Di DPRA, RAPBD akan dibahas bersama-sama antara tim eksekutif dan anggaran Legislatif.
7. Setelah dibahas dan mendapat persetujuan dari DPRA maka RAPBA dapat disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang di tetapkan dengan peraturan Pemerintah Aceh .
8. Pelaksanaan APBA dan pembuatan laporan pertanggung jawaban anggaran.

Indikator Partisipasi Penyusunan Anggaran SKPD

Menurut Milani (2000) partisipasi manajer dapat dilihat dari beberapa aspek atau indikator, yaitu:

1. Keterlibatan manajer atau pimpinan dalam penyusunan anggaran.
2. Wewenang manajer atau pimpinan dalam penyusunan anggaran.
3. Keterlibatan manajer dalam pengawasan proses penyusunan anggaran.
4. Keterlibatan manajer dalam tujuan pelaksanaan anggaran pada bidang yang dipimpin.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Penyusunan Anggaran

Rudianto mengatakan beberapa faktor yang menyangkut dengan indikator partisipasi penyusunan anggaran antara lain (2009:10):

1. Tingkat Kesulitan.
2. Partisipasi Manajemen Puncak.
3. Keadilan.
4. Kesulitan Departemen Anggaran.

5. Struktur Organisasi.
6. Sumber daya.

Masalah dalam Anggaran Partisipatif

Menurut Arfan Ikhsan dan Muhammad Ishak (2005:175), anggaran partisipatif mempunyai tiga potensi masalah, yaitu:

- 1) Menetapkan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.
- 2) Membuat kelonggaran dalam anggaran (*budgetary slack*).
- 3) Partisipasi semu (*pseudoparticipation*).

Anggaran Berbasis Kinerja (Prestasi Kerja)

Menurut Noerdiawan (2006:124), Anggaran disusun dengan pendekatan berbasis prestasi kerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi kerja atau input yang ditetapkan.

Indikator Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Noerdiawan (2006:130) Indikator anggaran berbasis kinerja adalah:

- a. Spesifik dan jelas; sehingga tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
- b. Dapat diukur secara objektif; yaitu dua orang atau lebih yang mengukur indikator dan sasaran kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
- c. Relevan; indikator dan sasaran kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan.
- d. Penting; indikator dan sasaran kinerja harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan operasional, keluaran, hasil, manfaat dan nampak.
- e. Sensitif terhadap perubahan; indikator dan sasaran kinerja harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian dan hasil program.
- f. Terukur; baik secara kuantitatif dan kualitatif.
- g. Efektif; indikator dan sasaran kerja yang dipergunakan dapat disimpulkan diolah dan dianalisis datanya dengan biaya yang tersedia.

Konsep Penganggaran Aceh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana kalangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh dan DPRA dan ditetapkan dengan Peraturan Aceh (Permendagri 13/2006 pasal 1 ayat 9). APBA juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tujuan bernegara (Permendagri 13/2006 pasal 45 ayat 3). Anggaran dalam organisasi sektor publik merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial* (Mardiasmo, 2002:61).

Proses Penyusunan Anggaran

Penyusunan APBA diawali dengan penyampaian Kebijakan Umum APBA (KUA) sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Aceh, sebagai landasan penyusunan RAPBA kepada DPRA untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBA. Berdasarkan KUA yang telah disepakati oleh Kepala daerah dan DPRA, Pemerintah Aceh bersama dengan DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPA.

Kepala SKPA selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPA (RKA-SKPA) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. RKA-SKPA ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. RKA-SKPA ini kemudian disampaikan kepada DPRA untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBA. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan aceh sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Aceh tentang APBD (Permendagri 13/2006 pasal 105 ayat 2).

Proses selanjutnya Pemerintah Aceh mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBA disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRA untuk dibahas dan disetujui. APBA yang disetujui DPRA ini terinci sampai dengan dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRA tidak menyetujui Rancangan Perda APBA tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Aceh dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBA tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib (Permendagri 13/2006 pasal 106 ayat 1). Penetapan perda/qanun tersebut bersama-sama dengan DPRA menunjukkan adanya "kontrak" antara kepala daerah dengan DPRA. Secara kelembagaan, DPRA merupakan representasi rakyat/pemilih, yang mendelegasikan kekuasaannya sebagai *the ultimate principal* kepada anggota DPRA dipilih melalui Pemilu.

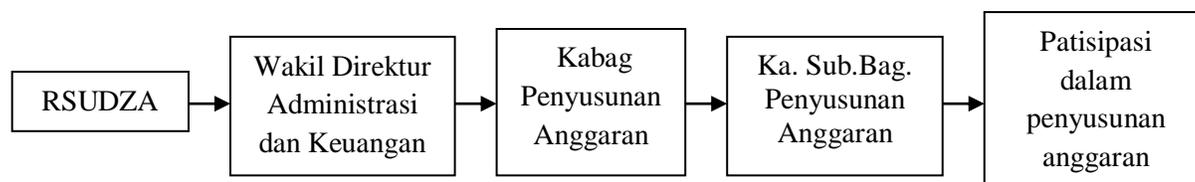
Kinerja Sektor Publik

Pengukuran kinerja SKPA dilakukan dengan menilai seberapa baik SKPA melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan selama periode anggaran. Sesuai dengan Permendagri No.13/2006, Kepala SKPA adalah pengguna anggaran yang melakukan tugas dimulai dari proses penyusunan APBA, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaksanaan dan penataan pendapatan, akuntansi, pelaporan dan perubahan APBA. Kepala SKPA dibantu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan kewenangannya tersebut .

Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti/ Tahun	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	Haykal (2007)	Analisis peran dan fungsi SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah serta pengaruhnya terhadap kinerja (studi pada Pemkab Aceh Timur)	Penyusunan anggaran secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
2	Jaryanto (2008)	Analisis Partisipasi Penyusunan Anggaran dan desentralisasi terhadap kinerja manajerial dengan sistem akuntansi manajemen sebagai variabel intervening	Partisipasi penyusunan anggaran dan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial
3	Soetrisno (2010)	pengaruh partisipasi, motivasi dan pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial	Partisipasi dan pelimpahan wewenang berpengaruh terhadap kinerja manajerial

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Berdasarkan tinjauan terhadap teori dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: Partisipasi Penyusunan anggaran pada Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh belum berfungsi secara optimal.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran pada SKPA RSUDZA telah berfungsi dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat RSUDZA Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah sensus.

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perangkat Satuan Kerja RSUDZA Banda Aceh. Adapun yang menjadi responden penelitian adalah pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pegawai yang mempunyai jabatan struktural di lingkungan RSUDZA Banda Aceh dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan anggaran .
2. Pegawai/staf (tidak mempunyai jabatan) telah terlibat langsung dalam penyusunan anggaran setiap tahunnya dan mempunyai pengalaman kerja dibidang penyusunan anggaran minimal 2 tahun.

Dengan adanya kriteria, maka jumlah pegawai sebagai populasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan sebanyak 37 orang. Adapun populasi (pegawai) yang memenuhi kriteria dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel Populasi Sasaran Pada RSUDZA Banda Aceh

No	Populasi sasaran	responden
1	Kepala /Direktur	1
2	Wadir (Wakil Direktur)	4
3	Sekretaris /Kabag TU	1
4	Kepala Bidang Program	1
5	Kepala Bidang Teknis lainnya	10
6	Kasie logistik,Pengadaan dan Program	7
7	Staf yg terlibat dalam penyusunan anggaran	13
Jumlah		37

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Data digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil penyebaran kuesioner pada sampel yang telah ditentukan. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka, misalnya menanyakan nama responden, tempat tinggal responden, usia responden dan menggunakan pertanyaan tertutup, yaitu

meminta responden untuk memilih salah satu jawaban yang disediakan dari setiap pertanyaan. Skala pengukuran penelitian dilakukan dengan *skala likert*, dimana skala ini menghasilkan jawaban sangat tidak setuju sampai jawaban sangat setuju dalam rentang nilai 1 sampai 5.

2. Data Sekunder

Data Sekunder data yang diperoleh dengan cara mempelajari literatur yang dapat menunjang dan melengkapi data yang diperlukan serta dapat berguna bagi penyusunan penelitian ini. Data Sekunder juga merupakan pengumpulan data dengan tujuan untuk mengetahui berbagai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, diantaranya berasal dari buku, majalah, ataupun jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah memperjelas indikator dan alat ukur yang digunakan untuk variabel tersebut, dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Partisipasif penyusunan anggaran	Partisipasi Penyusunan anggaran adalah dalam konteks pemerintahan daerah adalah keterlibatan SKPD dalam penyusunan anggaran (APBD) (Abdullah 2012)	1. Tujuan Anggaran, 2. RKA dalam penyusunan anggaran, 3. Partisipasi/keikutsertaan, 4. Penetapan anggaran, 5. Pelaksanaan anggaran 6. Laporan anggaran (Permendagri No. 13 tahun 2006)	Interval

Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis hipotesis diskriptif. Sugyono (2008:147) mengatakan bahwa hipotesis dekritif yang diuji dengan statistik parametris merupakan dugaan terhadap nilai dalam satu sampel dibandingkan dengan standar. Selanjutnya Sugyono mengatakan untuk menguji hipotesisi deskriptif satu variabel bila datanya berbentuk rasio atau interval maka digunakan t-test satu sampel.

Berdasarkan pendapat yang disampaikan Sugiyono tersebut diatas, maka penulis dapat menentukan langkah-langkah menguji hipotesis sebagai berikut:

1. Membuat tabulasi data dari hasil jawaban responden terhadap variabel penelitian yang digunakan. Tabulasi data ini dengan menggunakan nilai rata-rata, untuk menggambarkan persepsi responden atas item-item pertanyaan yang diajukan.
2. Menentukan apa yang diharapkan, yaitu menentukan jumlah skor ideal (yang diharapkan) yaitu responden memberikan jawaban dengan skor tertinggi.
3. Menentukan uji t-test satu sampel (menggunakan alat bantuan SPSS) untuk mengetahui sejauh mana hipotesis diketahui kebenarannya .

Rancangan Pengujian Hipotesis

- a. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka menerima hipotesa nol (h_0) artinya hipotesis diterima yaitu partisipasi penyusunan anggaran di RSUDZA Banda Aceh belum berfungsi secara optimal.
- b. Jika $t \text{-hitung} > t \text{-tabel}$, maka hipotesa nol ditolak, artinya hipotesis ditolak, yaitu pelaksanaan partisipasi dalam penyusunan anggaran RSUDZA Banda Aceh telah berfungsi secara optimal sebagaimana yang diharapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Instrumen Data

Kualitas data yang diperoleh dari penggunaan intrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua pengujian ini dilakukan secara statistic secara sekaligus dengan bantuan program SPSS (Budi,2006:237) sebagai berikut :

1) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Cronbach Alpha sedangkan uji validitas menggunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Hasil Uji Reliability dan Uji Validitas

Reliability Statistics				
Cronbach's Alpha	N of Items			
0.875	6			

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted

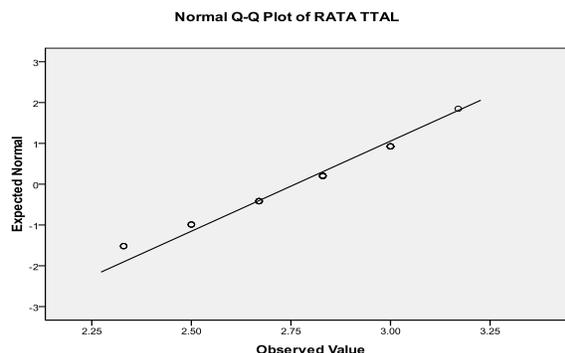
BUTIR 1	8.8065	4.828	0.875	0.834
BUTIR 2	8.7742	4.647	0.931	0.823
BUTIR 3	8.5484	3.123	0.895	0.832
BUTIR 4	8.6129	4.778	0.591	0.869
BUTIR 5	7.8387	5.340	0.610	0.869
BUTIR 6	7.4194	5.185	0.480	0.884

Dari tabel tersebut dapat diinterpretasi Uji Reliabilitas dan Uji Validitas sebagai berikut:

1. Pada bagian *Reliabilitas Statistic* terlihat bahwa nilai *Alpha Cronbacts* hitung $0.8750 > 0.2407$ pada taraf kepercayaan 95% atau probabilitas signifikan 0.05 % atau total *Alpha Cronbachs* diatas 50 %, sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing butir dari kuesioner adalah sangat *reliable* yang berarti kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah handal.
2. Pada *Item Total Statistic*, Nilai *Corrected Item Total Correlation* (r) hitung $> r$ tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua butir yang ada dalam kuesioner (butir 1 sampai dengan 6) dapat dinyatakan valid.

2) Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas data suatu penelitian, dapat dideteksi dengan analisis grafik statistik. Analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal atau grafik *normal probability plot*. Dasar pengambilan keputusan normal plot tersebut: jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal (Ghozali,2005:110). Dalam penelitian ini hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar Normalitas Plot

Dari hasil uji tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Grafik normal plot di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dari gambar di atas disimpulkan bahwa model garis regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Dari hasil uji normalitas di atas dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran di RSUDZA Banda Aceh terbukti berdistribusi normal.

Pengujian Hipotesis Deskriptif

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini berupa pengujian hipotesis deskriptif, bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran pada RSUDZA Banda Aceh belum dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji *t one sample*. Alat bantu yang dipakai adalah program SPSS (*Statistical Program For Social Science*). Hasil uji *t one sample* sebagai berikut :

Tabel Hasil Uji t - One Sampel

	Test Value = 2.9					
	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
RATA TTAL	- 3.364	29	.002	-.13900	-.2235	-.0545

Dari uji *one sampel test* dapat dilihat bahwa t hitung -3.364 (negatif) yaitu t hitung (-3.364) lebih kecil dari t tabel (1.980) ($-3.364 < 1.980$). Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima artinya bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran pada RSUDZA Banda Aceh belum optimal.

PEMBAHASAN

Hasil uji t partisipasi dalam penyusunan anggaran pada RSUDZA Banda Aceh, menunjukkan bahwa nilai uji t hitung $= -3.364 < 1.980$. Ini berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini mempunyai makna bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran pada RSUDZA Banda Aceh belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, makna lain yang terkandung dari hasil uji t tersebut bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran pada RSUDZA Banda Aceh menggunakan informasi belum akurat baik dalam pengambilan keputusan maupun perencanaan kedepan, sehingga penyusunan anggaran pada RSUDZA Banda Aceh kedepan tidak dapat mengikuti tantangan dan perkembangan yang terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh sebagai salah lembaga Pemerintah Aceh yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam menghasilkan anggaran yang sangat berguna untuk membangun menuju masyarakat sejahteraan dan berkeadilan di Aceh.
2. Partisipasi dalam penyusunan anggaran yang di jalankan oleh Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat ditunjukkan hasil uji *t-one sampel* lebih kecil dari *t table* ($-3.364 < 1.980$) sehingga penyusunan anggaran pembangunan ke depan tidak dapat mengikuti tantangan dan perkembangan yang terjadi.

SARAN-SARAN

1. Disarankan kepada penelitian selanjutnya/mendatang untuk melakukan penelitian yang sama dengan memasukkan unsur unsur variabel lainnya, karena dengan satu variabel penulis menganggap akan belum memberikan hasil yang sempurna bagi Pemerintah Aceh.
2. Disarankan kepada RSUDZA Banda Aceh meningkatkan partisipasi aktif bagi masyarakat Aceh dalam penyusunan anggaran pembangunan yang presentatif untuk menuju Aceh siap menghadapi globalisasi dunia yang sebentar lagi masuk ke Aceh.

DAFTAR PERPUSTAKAAN

- Abdullah. 2012. *Keterlibatan SKPD Dalam Penyusunan Anggaran Daerah (APBD)*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Ahmad & Arfan, Muhammad. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi kasus pada Pemerintah Deli Serdang)*. Tesis USU tidak dipublikasikan.
- Arfan & Ihsan. 2005. *Anggaran Partisipatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Budi. 2006. *Analisis data Statistik dengan Program SPSS*. CV. Andi Offset.

- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP
- Gul, dkk. 2001. *Ekonometrika Dasar: Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga
- Kenis, L. 2004. Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Reveiw*. Vol LIV (4) :707.721.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jaryanto. 2008. Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja Manajaerial dengan Sistem Akuntansi Manajemen sebagai variable intervening ((studi pada Perusahaan manufaktur di Jawa Tengah). *Focus Ekonomi*. Vol 3 No.2.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Milani. 2000. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Nordiawan, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Putra, Sondi. 2009. *Penganggaran dalam Sektor Publik*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Ramadhani & Nasution. 2009. *Tahapan dalam Partisipasi Anggaran*. FE USU.
- Riyadi, S. 2002, *Motivasi dan Pelimpahan Wewenang sebagai variable Moderating, dalam hubungan antara Partisipasi penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah* .
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Rudianto. 2009. *Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran*. Jakarta: PT Grasindo.
- Saraswati, Gita Pramudia. 2015. *Pengukuran Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.

- Sekaran, Uma. 2006. *Reserch Methods For Business, Edisi 4 buku I*, terjemahan Yon, Kawan. Jakarta: Salemba Empat.
- Sofian. 2007. *Faktor Permediasi pada Pengaruh Partisipasi Penganggaran terhadap Kinerja Pejabat Struktural Perguruan Tinggi*. SKripsi Fakultas Ekonomi Katholik Atma Jaya.
- Supomo & Indriantoro. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama*. Yogyakarta : BPF.
- Sugiyanto. 2014. *Statistik Analisis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sudarsono, Heri. (2008).. *Bank Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syukri, Abdullah (2012), *Keterlibatan SKPD dalam Penyusunan Anggaran Daerah (APBD)* Jakarta: PT Grasindo.
- Yuda, Eka. (2013). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah. Dalam Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Penyunting: Abdul Halim*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.